



LAPORAN KEGIATAN

**IPU – UN THE 2021 ANNUAL PARLIAMENTARY HEARING
“FIGHTING CORRUPTION TO RESTORE TRUST IN
GOVERNMENT AND IMPROVE DEVELOPMENT PROSPECTS”**

**NEW YORK – AMERIKA SERIKAT
17 – 18 FEBRUARI 2021**



**BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



**LAPORAN PELAKSANAAN
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

IPU-UN *The 2021 Annual Parliamentary Hearing,*
“Fighting corruption to restore trust in government and improve development prospects”

(VIRTUAL)

New York, Amerika Serikat

17-18 Februari 2021

I. PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Sidang Parlemen Tahunan atau *The 2021 Annual Parliamentary Hearing Inter-Parliamentary Union (IPU) – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)* tahun ini, bertajuk “Memerangi Korupsi untuk Memulihkan Kepercayaan pada Pemerintah dan Meningkatkan Prospek Pembangunan”, dirancang untuk memastikan kontribusi parlemen terhadap Deklarasi Politik *United Nations General Assembly Special Session (UNGASS)* yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 hingga 18 Februari 2021.

Annual Parliamentary Hearing IPU-PBB adalah acara bersama utama (*a flagship joint event*) Perserikatan Bangsa-Bangsa dan IPU yang dirancang untuk menyumbangkan perspektif parlemen ke proses-proses utama PBB. Audiensi Parlemen dimulai sebagai acara IPU di akhir tahun 90-an ketika visi dimensi parlementer terhadap karya Perserikatan Bangsa-Bangsa masih dalam tahap embrionik.

The 2000 Millennium Declaration adalah kesepakatan tingkat tinggi pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengakui peran IPU dalam membawa suara anggota parlemen ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Deklarasi tersebut, Negara Anggota memutuskan “untuk memperkuat lebih lanjut kerjasama antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan parlemen nasional melalui organisasi dunia mereka, IPU, di berbagai bidang, termasuk perdamaian dan keamanan, pembangunan ekonomi dan sosial, hukum internasional dan hak asasi manusia, serta masalah demokrasi dan gender”.

B. SUSUNAN DELEGASI

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Dr.H.Fadli Zon, S.S.,M.Sc.	F.PGERINDRA /A-086	Ketua BKSAP
2.	Dr, Sihar Sitorus	F. PDIP/ A-139	Wakil Ketua BKSAP
3.	H.Andi Ahmad Dara, S.E.	F.PGOLKAR/ A-326	Anggota BKSAP

C. VISI DAN MISI DELEGASI

- Memberikan pandangan/ide Indonesia terkait topik-topik yang diangkat dalam *The 2021 Annual Parliamentary Hearing*.
- Menyampaikan perpektif terkait penanganan korupsi di Asia Tenggara.

D. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Materi yang dijadikan referensi bagi Ketua BKSAP DPR RI diolah oleh Tenaga Ahli dan Sekretariat KSI BKSAP berupa Pidato dan Bahan Intervensi.

II. ISI LAPORAN

A. AGENDA ACARA

1. Sidang Hari Pertama (17 Februari 2021)

Hari pertama diawali dengan Opening Session dengan pembicara: **Mr. Volkan Bozkir**, President of the seventy-fifth session of the General Assembly; **Mr. Duarte Pacheco**, President of the Inter-Parliamentary Union (IPU); **Ms. Delia Ferreira Rubio**, Chair of the Board of Transparency International (keynote speaker). Materi utama yang diangkat pada sidang hari pertama adalah mengenai “Bagaimana Korupsi Mengerogoti Demokrasi dan Pembangunan, serta Perlunya Keterlibatan Parlemen”.

Sidang dilanjutkan dengan diskusi panel yang dibagi ke dalam dua sesi. Panel I mengungkap topik: “Konvensi Anti Korupsi: Pembangunan, implementasi, dan tantangan”, sedangkan Panel II membahas mengenai “Korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar atau korupsi besar (*grand corruption*)”.

Panelis pada sidang sesi pertama yakni: **H. E. Mr. Ahmad bin Abdulla Bin Zaid Al Mahmoud**, Ketua Shura Council Qatar, Ketua Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC); **Ms. Cynthia Lopez Castro, MP**, Kongres Mexico, anggota the Forum of Young Parliamentarians; **H. E. Mr. Eric Anderson Machado**, Perwakilan Tetap Peru untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Vienna dan Co-facilitator untuk the Political Declaration of the UNGASS 2021 against corruption; serta **Ms. Ghada Fathi Waly**, Direktur Eksekutif, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Panelis pada sidang sesi kedua adalah: **H. E. Ambassador Kjersti E. Andersen**, Perwakilan Tetap Norwegia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Vienna; **Hakim Richard Goldstone** (Afrika Selatan), Pendiri dan anggota, Integrity Initiatives International, serta **Mr. Juan Fernando Lopez Aguilar**, Anggota Parlemen Eropa, Ketua Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE).

2. Sidang Hari Kedua (18 Februari 2021)

Materi yang diangkat pada sidang hari kedua adalah terkait dua hal: 1) Kebijakan anti korupsi yang sensitif jender; serta 2) Pengukuran anti-korupsi: keterbukaan aset, pemilik manfaat, pelapor pelanggaran, dan pendanaan partai politik.

Diskusi panel yang pertama pada hari kedua (Panel III) menghadirkan pembicara: **Senator Susan Kihika**, Senat Kenya, President of the Bureau of Women Parliamentarians, mantan penuntut umum; **H.E. Mr. Alie Kabba**, Perwakilan Tetap Sierra Leone untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden UN Women, anggota Grup Penasehat urusan Jender bagi Presiden Majelis Umum; **Dr. Anna Petherick**, Blavatnik School of Government, Universitas Oxford, pakar relasi jender dan korupsi.

Sedangkan pada sesi kedua (Panel IV), dibahas mengenai “*Key anti-corruption measures: assets disclosure and beneficial ownership, whistleblowers, and financing of political parties/elections*”, dengan panelis sebagai berikut: **Mr. Fadli Zon, MP**, Ketua BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sekaligus Ketua Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC); **Mr. Akmal Saidov, MP**, Oliy Majlis Uzbekistan, Anggota Komite Eksekutif IPU; **Ms. Sanda Ojiambo**, CEO dan Direktur Eksekutif, UN Global Compact; serta **Ms. Ana Gomes**, mantan anggota Parlemen Eropa dan mantan diplomat.

B. SITUASI UMUM

Topik *Annual Hearing* adalah “*Fighting Corruption, Restoring Trust In Government And Improving Development Prospects*”. Topik ini sejalan dengan *United Nations General Assembly Special Session* (UNGASS) yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-4 Juni 2021 di New York. Hearing pertama kali diadakan secara virtual akibat pandemi COVID-19.

Pada Sesi Pembukaan, Presiden Sidang Umum yang ketujuh puluh lima, **Mr. V. Bozkir**, mengatakan bahwa Sidang Istimewa ke-32 Sidang Umum yang akan diadakan pada bulan Juni 2021 dimaksudkan untuk memberikan pembahasan yang substantif tentang pemberantasan korupsi. Dalam konteks itu, anggota parlemen memainkan peran

penting dalam menerjemahkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa ke dalam undang-undang, memberi tahu Negara-negara Anggota tentang tantangan yang dihadapi orang dan harapan orang, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah. Di 2003, Majelis Umum telah mengadopsi United Nations Convention against Corruption (UNCAC), satu-satunya instrumen antikorupsi universal yang mengikat secara hukum. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 16 dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, juga diadopsi oleh Negara Anggota, berfokus pada pembangunan lembaga yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pandemi COVID-19, seperti korupsi, secara tidak proporsional memengaruhi orang-orang yang paling rentan. Oleh karena itu, upaya antikorupsi menjadi lebih mendesak. Dia menekankan perlunya melibatkan perempuan dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan karena partisipasi mereka membantu mencegah korupsi dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan kuat.

Masih dalam opening session, Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU), **Mr. D. Pacheco**, mengatakan bahwa korupsi adalah salah satu kanker yang mengancam demokrasi dan antikorupsi harus menjadi inti pekerjaan para anggota parlemen. Kerugian finansial akibat korupsi jauh melebihi US \$ 140 miliar didistribusikan setiap tahun dalam bantuan. Meskipun UNCAC menawarkan panduan berharga tentang cara memerangi korupsi, kemauan politik diperlukan untuk menerapkan konvensi tersebut secara penuh. Korupsi memengaruhi situasi kehidupan nyata seperti ketika suap ditentukan kapan izin usaha diberikan dan kontrak mana yang diberikan. Korupsi, seperti kebanyakan kejahatan, tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diatasi tidak lebih dari gangguan. UNCAC mungkin belum menyelesaikan masalah, tetapi hal itu telah meningkatkan kesadaran akan masalah tersebut dan membawa perubahan yang tidak terbayangkan hanya dua puluh tahun yang lalu.

Dilanjutkan dengan pidato dari **Ms. D. Ferreira Rubio**, Ketua Dewan Transparansi Internasional, yang telah memerangi korupsi di lebih dari 120 negara selama lebih dari 25 tahun, mengatakan bahwa untuk memulihkan kepercayaan pada institusi, kepemimpinan, pemerintah, dan masing-masing lainnya, adalah penting agar kebenaran dihargai dalam masyarakat. Untuk mengangkat kebenaran dan mengurangi misinformasi dan berita palsu, diperlukan transparansi dan integritas yang lebih baik di sektor publik dan swasta, dan tidak boleh ada impunitas. Hukum dan konvensi memang

penting, tetapi standar, komitmen, dan deklarasi harus diterapkan sepenuhnya. Korupsi melemahkan institusi, merusak supremasi hukum, mengikis demokrasi dan pembangunan, dan berdampak negatif pada hak, kebebasan, dan kualitas hidup orang. Negara-negara yang mendapat peringkat baik di Indeks Persepsi Korupsi Transparency International melakukannya lebih baik dalam hal kebebasan berekspresi, menghormati kebebasan media, kekuatan demokrasi dan institusi, serta check and balances yang efektif. Negara-negara di mana korupsi merajalela tidak mampu untuk menyediakan layanan kesehatan yang memadai selama pandemi COVID-19 dan memiliki respons paling represif dan tidak demokratis terhadap pandemi.

Setelah Opening Session, diadakan diskusi Panel I dengan tema: “Konvensi Menentang Korupsi: Membangun Blok dan Mengimplementasikan Tantangan”, lalu dilanjutkan dengan Panel II dengan materi: Korupsi yang melibatkan aset dalam jumlah besar (*VQA: Vast Quantity Asset*), alias "*grand corruption*".



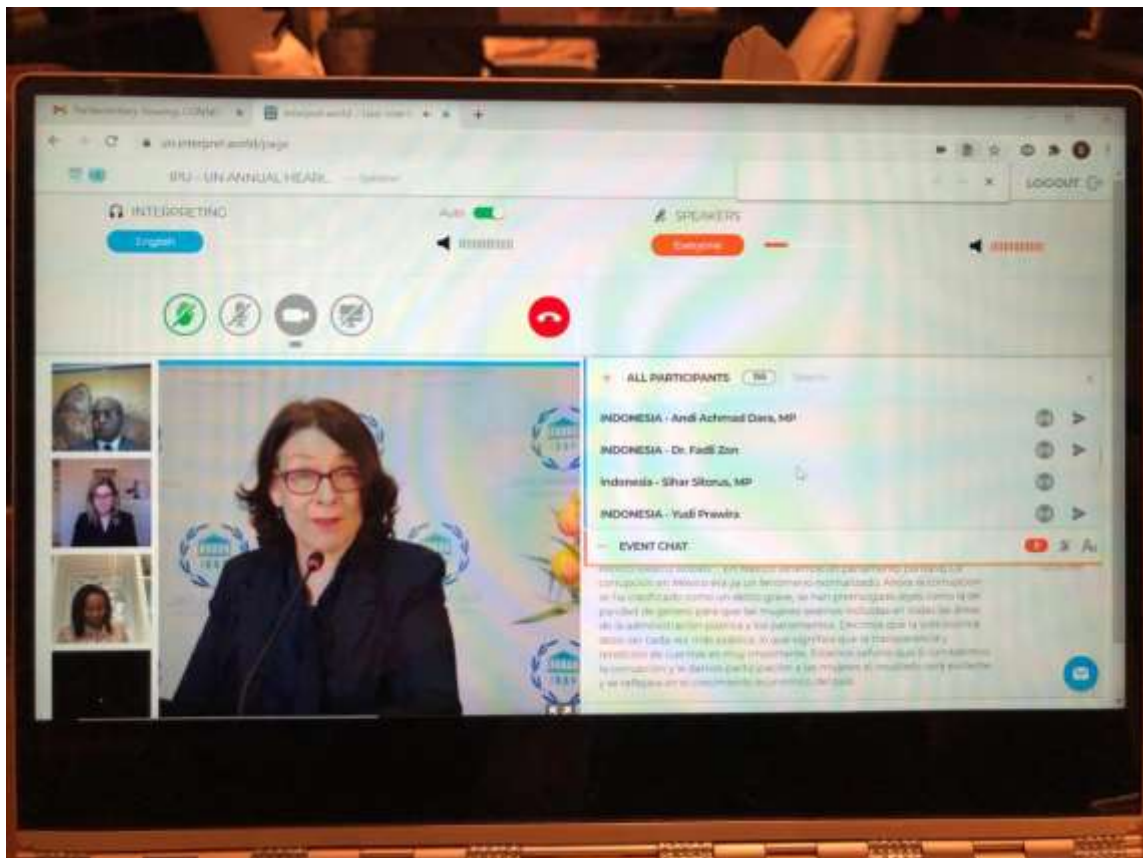
Sidang Hari Pertama, 17 Februari 2021

(note: hanya panelis saja yang ditampilkan gambarnya pada aplikasi Interprefy)

Sidang Hari Kedua dimulai dengan diskusi Panel III dengan materi: “Kebijakan Anti Korupsi Yang Peka Gender”, dengan pembicara: Ms. Susan Kihika, Senator, Senate of Kenya, President of the IPU Bureau of Women Parliamentarians, and former

prosecutor; H. E. Mr. Alie Kabba, Permanent Representative of Sierra Leone to the United Nations in New York, President of the Executive Board of UN Women, member of the Gender Advisory Group of the President of the General Assembly; Dr. Anna Petherick, Blavatnik School of Government, University of Oxford, gender-corruption expert.

Acara dilanjutkan dengan diskusi Panel IV dengan tema: “Langkah-langkah anti-korupsi utama: pengungkapan aset dan Beneficial Ownership, whistleblower, dan pembiayaan partai politik / pemilu”, dimana Ketua BKSAP DPR sekaligus Ketua GOPAC, Dr.Fadli Zon, S.S.,M.Sc., menjadi salah satu pembicaranya.



Sidang Hari Kedua, 18 Februari 2021, sesi pertama (Panel III) dengan materi
“Gender-sensitive anti-corruption policies”.

C. PARTISIPASI DELEGASI

Dr. Sihar P.H. Sitorus, Wakil Ketua BKSAP menyampaikan intervensinya sebagai berikut:

- a. Di masa pandemi seperti saat ini, perempuan lebih rentan kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan mata pencaharian, yang menyebabkan mereka kesulitan mengakses layanan-layanan dasar seperti perawatan kesehatan dan pendidikan;
- b. Bahwa di Indonesia terdapat kampanye nasional bertajuk “Saya, Perempuan Anti-Korupsi” yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan sekaligus mencegah dan mengurangi korupsi;
- c. Parlemen dapat mengintensifkan kampanye ini dengan menyebarkannya ke daerah pemilihan/konstituen, demi dapat menyentuh unit terkecil di masyarakat;
- d. Tujuan penyebaran kampanye ke konstituen adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar melibatkan kedua gender dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia;
- e. Parlemen juga dapat berperan sebagai jembatan, yang dapat menghubungkan masyarakat di konstituen dengan agen-agen anti-korupsi seperti UNODC;
- f. Parlemen harus berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terkait isu ini.



Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr.Sihar P.H. Sitorus, BSBA., MBA., menyampaikan intervensinya pada Panel III (hari kedua sesi pertama).

Dr. Fadli Zon, Presiden SEAPAC sekaligus Ketua BKSAP DPR RI, menjadi panelis dalam Panel IV: “*Key anti-corruption measures: assets disclosure and beneficial ownership, whistle-blowers, and financing of political parties/elections*” menyampaikan sebagai berikut:

- a. Pemberantasan korupsi harus komprehensif dan negara-negara Asia Tenggara telah menyusun kebijakan untuk mengatasinya.
- b. Transparency International merilis Corruption Perception Index dan hanya menyebut tiga negara Asia Tenggara yang mendapatkan nilai di atas 50, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura.
- c. Hal penting dalam pemberantasan korupsi di antaranya adalah:
 - Keterbukaan atas sumber kekayaan;
 - Kejelasan atas kepemilikan dan siapa yang memperoleh keuntungan atas harta kekayaan;
 - Pembiayaan politik.
- d. Peran parlemen dalam upaya ini adalah menerjemahkan upaya ini dalam bentuk produk legislasi maupun kebijakan dan mengawasi pelaksanaannya.
- e. Peran South East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) sangat penting dalam menyatukan para anggota parlemen negara Asia Tenggara yang memiliki kepedulian yang sama dalam upaya pemberantasan korupsi.



Ketua BKSAP, selaku Presiden SEAPAC, Dr.Fadli Zon, menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh delegasi-delegasi negara lain.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. *The 2021 Annual Parliamentary Hearing* di Perserikatan Bangsa-Bangsa diselenggarakan secara bersama oleh *Inter-Parliamentary Union (IPU)* dan Kantor Presiden *General Assembly*. Audiensi (*hearing*) bertema “Pemberantasan Korupsi untuk mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah dan meningkatkan prospek pembangunan” (“*Fighting corruption to restore trust in government and improve development prospects*”). Karena pandemi COVID-19, Dengar Pendapat diadakan secara virtual pada 17 dan 18 Februari 2021.
2. Audiensi ini berfungsi sebagai kesempatan bagi anggota parlemen untuk membahas bagaimana mereka dapat berkontribusi pada Deklarasi Politik *United Nations General Assembly Special Session (UNGASS)* pertama, yang berfokus pada korupsi (2-4 Juni 2021). UNGASS tentang korupsi akan memberikan kesempatan untuk menggalang kemauan politik Pemerintah dan komunitas internasional secara keseluruhan dalam memajukan perang melawan korupsi.
3. Audiensi mempertemukan sekitar 200 anggota parlemen dari 80 negara.
4. Sidang tersebut menekankan perlunya memberantas korupsi yang merusak kualitas hidup; menghambat pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan,

dan kesetaraan gender; dan demokrasi yang terkikis. Memerangi korupsi berarti memulihkan nilai kebenaran di masyarakat dan merangkul transparansi dan akuntabilitas. Respons terhadap pandemi COVID-19 perlu memperhitungkan peningkatan risiko korupsi melalui langkah-langkah yang adil dan transparan.

5. Anggota parlemen memainkan peran sentral dalam memberantas korupsi karena mereka dapat memperkuat hukum nasional dan internasional, dan memastikan bahwa mereka dilaksanakan, didanai, dan dipantau dengan benar. Praktik-praktik korupsi tersebut berdampak sangat buruk pada kehidupan perempuan - secara sosial, politik dan ekonomi - sehingga semakin memperlebar kesenjangan kesetaraan gender. Dalam hal ini, anggota parlemen harus memprioritaskan kebijakan sensitif gender dan bekerja untuk menciptakan budaya yang tidak mentolerir korupsi. Korupsi adalah fenomena global yang menuntut tanggapan multilateral dan segera di semua lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, media, dan masyarakat sipil.
6. Deklarasi Politik UNGASS diperlukan untuk memperbaiki praktik antikorupsi saat ini serta mengatasi masalah baru sejak UNCAC diberlakukan pada tahun 2005. Parlemen harus terlibat lebih dekat dengan negosiator Deklarasi Politik pemerintah masing-masing untuk memberikan masukan bagi proses tersebut.

IV. PENUTUP

A. ANGGARAN

Anggaran yang dipergunakan untuk mengikuti acara ini adalah sejumlah IDR 27.634.000.

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

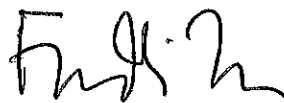
- *Paparan narasumber*
- *Dokumentasi*

C. KATA PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok Laporan Kegiatan dalam rangka mengikuti sidang virtual IPU-UN *The 2021 Annual Parliamentary Hearing "Fighting Corruption, Restoring Trust In Government And Improving Development Prospects"* pada tanggal 17-18 Februari 2021 di New York, Amerika Serikat. Dokumen mengenai sidang akan dijadikan lampiran. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2021

Ketua Delegasi,



Dr. Fadli Zon

A-86

BAHAN PAPARAN



IPU-UN Parliamentary Hearing

*Fighting Corruption to Restore Trust in Government and
Improve Development Prospects*

17-18 February 2021

CHECK AGAINST DELIVERY

Speech President SEAPAC, Dr. Fadli Zon, MP

***Key anti-corruption measures: assets disclosure and beneficial ownership,
whistleblowers, and financing of political parties/elections***

***Honorable Mr. Akmal Saidov, IPU Executive Committee member,
Ms. Sanda Ojiambo, CEO and Executive Director of UN Global Compact,
Ms. Ana Gomes, Former member of the European Parliament,
Fellow Parliamentarians,***

***Assalamualaikum Wr., Wb.
Peace be upon us all,***

Thank You for inviting me to be on this panel to address vital issues within our organization's best interest. SEAPAC is a network of parliamentarians in the South East Asia region who solely focusing on anti-corruption and good governance issues.

We are a regional chapter of the Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC), an inter-parliamentarian network with Special Consultative Status with the UN ECOSOC. As part of this inter-parliamentarian network, SEAPAC, through GOPAC, has the opportunity to deliver a parliamentary contribution to the preparation process of the 2021 UNGASS.

The topical issues discussed today have a strong correlation with what SEAPAC and GOPAC contribute to the UNGASS preparation process. When it comes to anti-corruption matters, our first point of concern is how we can ensure that governments in the region are transparent and accountable.

This concern elaborates many dimensions within the UN Convention against Corruption (UNCAC).

It deals with how our government provides transparent and accountable public services to society. It relates to how we can build an integrity system through asset disclosure, whistleblower protection mechanisms, among others, and it is also linked to the way we sourced our next leaders through elections.

***Distinguished Delegates,
Ladies and Gentlemen,***

The Southeast Asia countries have introduced anti-corruption plans and policies to combat corruption. But the 2020 Corruption Perception Index published by Transparency International mentioned only three countries scored above 50 (Brunei Darussalam, Malaysia, and Singapore).

It shed light on the southeast Asia stakeholders that we need to do more.

We also need to shift our methods in combating corruption from mere criminalization to a more combination of prevention and criminalization.

Many of us are still considering that punishing the corrupt will have a deterrent effect to corruption. But developing preventive policies and measures is as equally crucial as criminalizing the perpetrators.

Just to set the context, the UN, in 2018, estimated the cost of corruption amount to \$3.6 trillion in the form of bribes and stolen money. In Indonesia alone, in that same year... corruption costs us \$401.45 million. Now, during the COVID-19 pandemic, evidence of a higher risk of corruption is everywhere, and it makes people even sicker.

Imagine what we can save annually if we also pay strong attention to prevention measures stipulated within the UNCAC.

Distinguished Delegates,

Let me share what GOPAC – SEAPAC has submitted as a parliamentary contribution to shape the 2021 UNGASS outcome.

We have long been since hoping for a strong and independent parliament by nature to exercise checks and balances with the executives. That hope is our first aspiration to the 2021 UNGASS, and to that end, integrity within the parliament body is a must.

It can only be done if we develop a whole integrity system through full implementation of asset declaration, beneficial ownership registry regulation, and more robust ethics for all public officials.

Better legislative frameworks to prevent and combat corruption is also needed. As we are moving towards a digitized world, we also need to harness technology. A digital whistleblower protection system and online beneficial ownership registry can be part of ideas to be advanced.

As part of such legislative frameworks, we also need to safeguard a key component in democracy.

We recognize the vital role of political parties as to the embryo of political leaders. Therefore, developing an open, transparent, accountable political party and its financial system, including the election process, shall serve as the backbone in the fight against corruption.

All these ideas require our role as parliamentarians to provoke change within the system. Many of these concerns are well placed within the Convention, under the chapter of prevention measures.

On asset declaration, the UNCAC in article 8 paragraph 5 details what needs to be declared by public officials, which may include outside activities, employment, investments, assets, and substantial gifts or benefits from which a conflict of interest may result for their functions as public officials. It is also being expanded into a declaration of interest for public officials in public procurement, screening procedures, and training requirements (article 9 paragraph 1e).

The UNCAC also set to prevent corruption involving the private sector through a beneficial ownership registry. In the Convention, it is categorized as transparency of the identity of legal and natural persons involved in the establishment and management of corporate entities (article 12 paragraph 2c). The Convention also covers the funding of candidatures for elected public office and political parties (article 7 paragraph 3) and whistleblower protection or the protection of reporting persons (article 33).

In short, UNCAC as the umbrella instrument against corruption has served its purpose to give ideas in improving our governance system. I consider this Convention as a forward-looking one that introduces several fundamental principles in combatting corruption.

Of course, there is room for improvement, such as international mechanisms to punish those who can escape among national legal loopholes and those who have impunity. That just another area for discussion at some other time, but, as a global instrument, the Convention goes beyond its design time.

Distinguished Guests,

I have mentioned before that all these provisions require parliamentarians' role. We cannot stop by ratifying it only.

We need to translate it into legislation or policies and even more oversight actions.

It is not just about a single role of legislation because I am fully aware that no single standard prescription of parliamentary products can deliver the same result. It also depends on the national context, social and political situations, and different legal systems.

For example, in the southeast Asia region, some countries have more than one legislation to regulate asset declarations. Then some countries do not have any legislation piece except a code of conducts or a parliamentary motion.

Some countries have anti-corruption law and regulating each differently on asset declarations be that its reporting timeline, type, and frequency (filed upon assuming public office, upon an increase in assets, or in a pre-specified time interval), its coverage (which officials, their relatives, and others), relevant authority/es and verification process, as well as what needs to be declared.

In terms of beneficial ownership, regulation, and system, as reported by the UNODC Analysis of Regulatory Deficiencies, they are unevenly developed across southeast Asia. Malaysia's Companies Act 2016 and Indonesia's Presidential Regulation 2018 have included all corporations/companies, foreign and domestic, to register their beneficial ownership. Indonesia even provides a central registry in the Ministry of Law and Human Rights and public access with a certain amount of fee.

But in some other southeast Asia countries, the development of beneficial ownership transparency is under other frameworks such as the Extractive Industry Transparency Initiative (EITI), which means only companies related to the extractive industry are mandated to report their beneficial ownership.

***Fellow Parliamentarians,
Distinguished Guests,***

Another critical aspect in combatting corruption is to encourage public reporting and to protect them. The whistleblower protection mechanism needs an expansion, yet, at the same time, we are aware that many southeast Asia citizens are silent when they found corrupt cases both in the public and private sectors.

To this end, we need to ensure that regulations are in place to protect the reporting persons and to devise measures eliminating potential retaliation measures due to the report.

In the aspects of political party financing and election, the southeast Asia countries also vary. Many believe that state funding is essential to political parties' work and that a cost-reduced election is crucial for allowing more talents to compete in the political arena.

But again... this will also depend on the open or closed political system, the socio-cultural situations, and others. For example, in Indonesia's rural areas, people often request money as subsistence in exchange for their participation in someone's campaign since they are used to receive wage in daily manners.

It then can be a debatable one, whether us giving some travel money to them can be considered as money politics or not. It also contributes to the high spending of political competition.

In that sense, I am reminded by our colleague from Timor Leste, a few days ago during our event a SEAPAC Information Webinar on the 2021 UNGASS, that there is one crucial thing we need to do.

That is civic education. To educate people, especially the youth, make them aware of the danger of corruption and enable them to be more critical of corruption.

***Mr. Chair,
Honorable presenters,***

SEAPAC, as an inter-parliamentarian network within southeast Asia, has a moral mandate to foster anti-corruption and good governance cooperation between like-minded parliamentarians. We have around 80 members across seven countries with at least four national chapters in Indonesia, Malaysia, Cambodia, Timor Leste.

We need to do many things in Southeast Asia, especially in these topical issues we are discussing on. There will be more programs, projects, and shared actions that can be exercised on these issues. I hope that we can be partners in promoting robust anti-corruption policies in the region.

For Parliamentarians from southeast Asia countries, I invite you to be members of GOPAC – SEAPAC. Let us be in collaboration to advance UNCAC in the region.

Join Us. Be our Ally!

***Thank You
Wassalamualaikum Wr., Wb.***

**Fighting corruption to restore trust in
government and improve development
prospects**



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.

Suggested Intervention
Annual Parliamentary Hearing



SIHAR SITORUS
**VICE CHAIR OF THE COMMITTEE FOR
INTERPARLIAMENTARY COOPERATION**

18 February 2021

21:00 – 22:15 GENDER SENSITIVE ANTI-CORRUPTION POLICIES

Madam Moderator,

Distinguished presenters,

Ladies and gentlemen,

Good Morning or it is good evening in our side of the globe.

The debate on gender and corruption has been the subject of much attention for at least more than two decades. Seminal papers from Swamy et al and Dollar et al in early 2000 has caught our attention during the dawn of the millennium, and adding to the debates of gender dimension into emerging research on corruption. In time of pandemic, like today, shrinking economic opportunities makes women become more vulnerable. Women are more susceptible to lose their jobs, incomes, and livelihood, and lead to their exclusion from access to basic services such as healthcare and education. Further, reallocation of budget to manage the pandemic and protect overloaded health system from collapsing could undermine delivery of gender sensitive programs.

Aside from mainstreaming, enacting and overseeing gender dimension on the legal basis for the national anti-corruption efforts, there are other roles that we could take.

First, we could intensify campaign efforts in our constituencies. This is with the aim to increase awareness and involving both gender in the anti-corruption efforts from the smallest unit in society.

Second, we could act as bridge builder between our constituents with the anti-corruption agency and UNODC. We could include our constituents on a dialogue with the aim to explore actionable ideas, develop practical solutions and identify good practices in order to achieved enhanced impact of anti-corruption programs for both men and women.

Third, we could support anti-corruption programs and initiatives, both at national and international scale, which is aimed toward empowering women and reducing corruption at the same time. On this occasion, kindly allow me to point out one of our national efforts, *Perempuan Anti Korupsi*. It is literally translated as I am a woman against corruption. The program is trying to address corruption at the institutions by focusing on behavior change and train women to become anti-corruption champions. Training individuals then instilling collective change. When women becomes motivated and feels that they are being part of a bigger movement, they will be brave to prevent and expose corruption practices.

However, in its ideal form, parliamentarian shall not work alone. Working together is the mantra. All elements of society must work together to pursue anti-corruption movement and even the smallest forms of society, i.e. family, could contribute to the cause.

Thank you.

BERITA



Fadli Zon Tegaskan Pemberantasan Korupsi Harus Komprehensif

19-02-2021 / B.K.S.A.P.



Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon. Foto : Ist/Man

Presiden Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), atau Organisasi Parlemen Asia Tenggara anti Korupsi, Fadli Zon menghadiri Forum Inter Parliamentary Union (IPU)-UN Annual Parliamentary Hearing. Forum tersebut merupakan pertemuan tahunan anggota parlemen dunia dan PBB. Tahun ini mengusung tema *Fighting Corruption to Restore Trust in Government and Improve Development Aspects*.

Berkesempatan menjadi panelis, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu mengaskan bahwa pemberantasan korupsi harus lebih komprehensif, mulai dari pencegahan hingga penindakan, dan s... Light... bersama dalam menerjemahkan elemen-elemen UNCAC (United Nations Convention against Corruption).

“Korupsi saat ini telah menjadi ancaman serius bagi pembangunan berkelanjutan. Dan bahayanya, ancaman itu hadir di dalam tubuh penyelenggara pemerintahan dan negara. Baik eksekutif maupun legislatif. Di tingkat nasional, regional, bahkan global,” kata Fadli melalui siaran persnya kepada *Parlementaria*, Jumat (19/2/2021).

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa kolaborasi antar parlemen memiliki andil besar dalam memberantas korupsi. Selama ini, pendekatan tradisional yang bertumpu pada pembentukan undang-undang dan penegakan hukum, tak lagi memadai untuk membangun mekanisme efektif dalam pemberantasan korupsi. Karena itu tak heran, meski setiap negara berhasil memproduksi ratusan regulasi setiap tahunnya, namun *corruption perception index* (CPI) tidak mengalami peningkatan signifikan.

“Dalam tataran lebih teknis, selain dengan membangun sistem penegakan hukum yang kuat, diperlukan perapihan kerangka bersama dalam menggali elemen-elemen UNCAC, dan menerjemahkannya menjadi legislasi, kebijakan hingga aktivitas pengawasan. Anggota parlemen harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik sosial politik, hingga kerangka hukum dalam menerjemahkan elemen UNCAC menjadi bagian dari intervensi parlemen,” imbuh Anggota Komisi I DPR RI itu.

Hingga saat ini, Fadli menyayangkan masih adanya perbedaan dalam menerjemakan elemen UNCAC di setiap negara di Asia Tenggara. Pada sejumlah negara misalnya, pengungkapan asset masuk dalam produk legislasi, tetapi ada juga yang hanya menjadi Kode Etik maupun keputusan parlemen. Begitu pula dengan pendaftaran pemilik manfaat. “SEAPAC saat ini tengah menyusun program memetakan pelaksanaan dan pengaturan UNCAC untuk mengetahui kekuatan, tantangan dan metode terbaik melaksanakannya,” ungkap Fadli.

Lebih lanjut, SEAPAC juga berkomitmen mendorong adanya kerjasama antarparlemen dalam pemberantasan korupsi pada satu platform bersama. Dan dalam konteks ini, SEAPAC membuka diri kepada setiap anggota parlemen, mantan anggota parlemen, dan organisasi-organisasi internasional untuk dapat saling berkolaborasi.

Guna mendukung ekosistem pemberantasan korupsi, diperlukan regulasi kuat untuk memberikan perlindungan pelapor. Saat ini sebagian besar negara telah memiliki regulasi. Namun, aspek mengenai perlindungan akan laporan balik atau aksi balasan, hingga pemecatan dari tempat kerja karena melaporkan perbuatan korupsi masih perlu diperdalam.

Sebagai informasi, forum yang berlangsung selama dua hari itu juga turut menghadirkan sejumlah pembicara termasuk Ketua GOPAC Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud, Co-Fasilitator Negosiasi Deklarasi UNGASS Eric Anderson Machado yang juga Peru Permanent Representative di Kantor PBB Vienna, dan Eksekutif Direktur UNODC Ghada Fathi Waly.

Forum tersebut menjadi bagian dari upaya IPU membangun dimensi 'keparlemenan' terkait isu PBB, yang tahun ini berfokus pada UN General Assembly Special Session (UNGASS) Against Corruption. Untuk itu, GOPAC dan SEAPAC sebagai jaringan anggota parlemen dengan status konsultatif pada UN ECOSOC telah menyumbangkan kontribusi tertulisnya untuk UNGASS. **(alw/sf)**



© 2016 Sekretariat Jenderal DPR RI. All rights reserved.